



Problems of Income Disparity Based on the Gini Ratio in the Indonesian Economy

Suci Frisnoiry^{1*}, Dwi Ayu Febrianti², Engeli Emmanuela Br Tambunan³, Gita Helena Tarigan⁴

Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Suci Frisnoiry sucifrisnoiry@unimed.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : Income Inequality, Gini Ratio, Economy

Received : 06 March

Revised : 22 March

Accepted: 24 April

©2024 Frisnoiry, Febrianti, Tambunan, Tarigan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Income Disparity is a problem that is still being intensively discussed. This journal aims to provide more in-depth knowledge about the economic system and income disparities in Indonesia. The type of research methodology used is descriptive qualitative. The data used in the research is in the form of literature, news stories and books. The results of the discussion show that the factors causing income disparities include investment, Human Development Index (HDI), labor productivity, economic growth, natural resources, differences in demographic conditions and education levels. The impact of income disparities is extreme poverty, and also endangers social stability and economic growth. The proposed solution involves equal development, equal education levels, equal minimum wages, community empowerment and the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector.

Problematika Disparitas Pendapatan Berdasarkan Rasio Gini dalam Perekonomian Indonesia

Suci Frisnoiry^{1*}, Dwi Ayu Febrianti², Engeli Emmanuela Br Tambunan³, Gita Helena Tarigan⁴

Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Suci Frisnoiry sucifrisnoiry@unimed.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Rasio Gini, Ekonomi

Received : 06 Maret

Revised : 22 Maret

Accepted: 24 April

©2024 Frisnoiry, Febrianti, Tambunan, Tarigan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Disparitas Pendapatan adalah masalah yang masih gencar untuk diperbincangkan. Jurnal ini bertujuan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem perekonomian dan disparitas pendapatan di Indonesia. Jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa literatur, berita, dan buku. Hasil pembahasan menunjukkan faktor penyebab disparitas pendapatan meliputi investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis dan tingkat pendidikan. Dampak dari disparitas pendapatan ialah kemiskinan yang ekstrem, dan juga membahayakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Solusi yang diusulkan melibatkan pemerataan pembangunan, pemerataan tingkat pendidikan, pemerataan upah minimum, pemberdayaan masyarakat dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia terus mengupayakan pembangunan ekonomi dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup warganya. Selama lima tahun terakhir, pembangunan ekonomi juga dilakukan di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur (Permana dan Puspitaningsih, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, sehingga tingkat perekonomian di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Hal ini mengakibatkan poly problematika yang terjadi di Indonesia. Problematika ekonomi di Indonesia cukup banyak, mulai dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, utang luar negeri, defisit anggaran dan bahkan ketidakmampuan industrial. Menurut Badan Pusat Statistik perekonomian Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu permasalahan yang membuat perekonomian menurun ialah disparitas pendapatan atau ketimpangan pendapatan.

Disparitas pendapatan selalu menjadi topik pembahasan bila menyangkut pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketimpangan atau disparitas pendapatan dalam sebuah negara dikatakan wajar terjadi selama masih dalam batas yang normal (Anwar dkk., 2019). Tingkat ketimpangan pendapatan itu diukur dengan menggunakan indeks rasio gini yang bernilai antara 0 hingga 1. *World Economic Forum* (WEF, 2014) telah menempatkan ketimpangan sebagai risiko global yang harus diwaspadai. Dengan begitu, WEF telah menempatkan disparitas pendapatan yang parah (*severe income disparity*) adalah yang menempati peringkat 4 dari 10 risiko global yang berprioritas tinggi pada tahun 2014. Disparitas pendapatan yang parah akan menyebabkan gangguan stabilitas sosial dan politik, sehingga berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik yang akan merembet ke krisis fiskal. Berbagai gangguan ini akan menyebabkan tekanan pada pasar tenaga kerja, mengakibatkan turunnya pendapatan, dan semakin memperparah ketimpangan. Data menunjukkan bahwa angka indeks rasio gini di Indonesia pada tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan (BPS, 2020a). Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kriminalitas di Indonesia dalam kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan (BPS, 2018; BPS, 2019; BPS, 2020b). Meskipun mengalami penurunan, rasio gini di Indonesia dalam kurun waktu tersebut berada pada rentang indeks 0,35 hingga 0,5 sehingga masih tergolong dalam kategori ketimpangan yang sedang/ moderat.

Melihat beberapa hal diatas maka, peneliti merasa perlu adanya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem perekonomian dan disparitas pendapatan di Indonesia. Bersamaan dengan hal itu, jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan disparitas pendapatan. Di dalam artikel ini termuat hal mengenai faktor penyebab disparitas pendapatan, serta mengusulkan beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi disparitas pendapatan demi menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi disebut sebagai cara untuk mentata atau menyusun segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah atau negara. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan masyarakat juga termasuk kedalam kegiatan ekonomi.

Fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain :

- a. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi.
- b. Menyediakan tata cara untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian.
- c. Menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata

Macam-macam sistem ekonomi menurut Elli Ruslina, S. H. (2012), antara lain:

- Sistem ekonomi tradisional/ konvensional
Ekonomi konvensional adalah sebuah sistem yang mengutamakan norma dan kebiasaan saat mengelola perekonomiannya. Dalam sistem ini, masyarakat akan bergantung pada sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mendesak sebagai upaya dalam bertahan hidup.
- Sistem ekonomi komandi/ terpusat/ sosialis
Sistem ekonomi komando, sering dikenal sebagai sistem ekonomi sosialis, adalah sebuah sistem di mana pemerintahlah yang mengendalikan dan mengatur perekonomian negara. Artinya pemerintah pusat akan merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan seluruh kegiatan perekonomian atas nama masyarakat. Dalam sistem ini pemerintah berperan dominan, khususnya sebagai pengambil keputusan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana. Prinsip sosialis Karl Marx menjadi dasar dalam sistem ekonomi terpusat.
- Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kebebasan individu dan bergantung pada mekanisme pasar untuk menjalankan bisnis. Sistem ini beroperasi dengan intervensi pemerintah yang minimal, dengan fokus pada kebijakan tertentu. Misalnya, pertimbangkan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki modal usaha karena operasi ekonomi yang dilakukan terfokus pada pengendalian pasar dan mempertahankan perusahaan guna memaksimalkan pendapatan.
- Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sebuah sistem yang memperhatikan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam menerapkan sistem ini, pemerintah dan dunia usaha memainkan peran yang saling melengkapi. Kerangka kerja ini melarang kelompok tertentu untuk memperoleh kendali ekonomi penuh atas sumber daya penting. Pemerintah mengawasi dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Sektor swasta diberikan kebebasan untuk memilih

kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya. Sistem ini merupakan system yang umum digunakan di banyak negara.

Disparitas pendapatan

Dalam pertumbuhan regional maupun nasional, disparitas pendapatan merupakan ciri khas dari proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Penyebab dari adanya disparitas pendapatan adalah terdapatnya variasi kandungan sumber daya alam tiap daerah dan demografi masing-masing daerah. Oleh karena itu, terdapat wilayah yang relatif maju dan relatif belum berkembang, hal ini berdampak pada kesejahteraan berupa ketidakpuasan masyarakat (Sjafrizal, 2012). Variasi kesejahteraan sendiri menyebabkan terjadinya keberagaman tingkat pembangunan pada suatu wilayah, sehingga menimbulkan disparitas atau kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Disparitas atau ketimpangan merupakan istilah yang lebih luas dibandingkan kemiskinan. Ketimpangan merupakan statistik luas yang mencakup seluruh penduduk, bukan hanya penduduk miskin saja. Teknik termudah untuk mengukur ketimpangan adalah dengan mengurutkan populasi berdasarkan pengeluaran (atau pendapatan). Persentase total biaya masing-masing kelompok kemudian dihitung dahulu kemudian setelah itu dibagi menjadi lima (kuintil) ataupun menjadi sepuluh kelompok. Dengan lima kelompok (kuintil), kelompok termiskin biasanya terletak pada 6-10% dari total pengeluaran, sedangkan kelompok terkaya berkisar 35-50% (Haughton, 2009).

Rasio Gini

Parameter kesetaraan yang paling sering digunakan ialah koefisien Gini (*Gini Ratio*), yang juga menunjukkan tingkat disparitas distribusi pendapatan individu. Kisaran nilai koefisien Gini adalah 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). Di masyarakat yang koefisien Gini-nya terletak kurang dari 0,3, ketimpangan pendapatannya tergolong rendah. Dan jika koefisien Gini-nya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,5, maka tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tergolong sedang. Jika koefisien Gini lebih dari 0,5 maka derajat ketimpangan pendapatan masyarakat tergolong sangat tinggi atau sangat timpang. Menurut (ADB, 2012), kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan dapat diukur berdasarkan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita. Rasio Gini biasanya digunakan untuk mengukur disparitas pendapatan.

Indeks Gini berfungsi untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang nilainya berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai Gini sama dengan nol, berarti pemerataan sempurna atau disparitas rendah. Dan jika nilai Gini adalah 1 maka distribusi pendapatan tidak merata sama sekali atau terdapat disparitas pendapatan yang tinggi (Wardhana, 2021).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{Pi(Qi + Qi - 1)}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Presentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

K = Banyaknya kelas pendapatan nilai

Apabila:

G < 0,3 = Ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang

G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

METODOLOGI

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur ataupun tahapan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah ataupun ilmu. Maka metode penelitian ini merupakan sebuah metode sistematis yang digunakan untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode ini bertujuan buat memusatkan serta mencari dan menciptakan kebenaran ilmiah yang sifatnya terperinci serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak menyimpang dari formulasi permasalahan. Tipe dari metodologi riset yang digunakan merupakan tipe deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam riset ini berbentuk literatur, koran, majalah serta buku dengan mencermati regulasi - regulasi yang diberlakukan oleh pihak regulator ialah Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan Annisa (2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Oxfam (2017) mengatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia diperkirakan memiliki pertumbuhan tercepat dalam hal kesenjangan antara kelompok superkaya dengan masyarakat lainnya selama 20 tahun terakhir. Ekonomi Pancasila muncul sebagai solusi atas kesulitan yang dihadapi Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan tujuan dari sistem ekonomi pancasila. Kesejahteraan umum berarti kemakmuran seluruh rakyat dan kemandirian rakyat untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan material maupun kebutuhan nonmaterial (Deliabilda, 2021).

Tjakrawedaj (2019) mengatakan bahwa tujuan dari sistem perekonomian itu sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan komponen-komponen sistem perekonomian: unit sumber daya, lembaga atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, dan kebutuhan pengelolaan ekonomi. Menurut pemahaman Bung Hatta, tata ekonomi yang dirangkai sebagai upaya bersama dengan asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, visi sistem ekonomi Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan setiap orang yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik material maupun non material (Deliabilda,2021).

Peranan negara dalam melaksanakan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia tercantum dalam Ayat (2) Pasal 27 serta Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa negara berperan dalam :

1. Menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga setiap orang dapat ikut serta secara aktif dalam kemajuan negara dan memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut.
2. Menetapkan kebijakan ekonomi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut terlaksana dengan baik demi kepentingan semua orang sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai, salah satu caranya yaitu meningkatkan pendapatan.
3. Melalui instrumen fiskal, negara mengembangkan program layanan bagi keluarga yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja secara produktif, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
4. mendirikan dan memperkuat BUMN dalam rangka menjaga stabilitas sehingga terwujudnya pemerataan ekonomi negara.
5. Mendorong terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan bahagia bagi masyarakat luas.

Sistem Ekonomi Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Pancasila bertumpu pada usaha ekonomi kerakyatan. Dalam bukunya, Mubyarto menafsirkan tentang pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta bahwa perekonomian Pancasila merupakan bagian dari perekonomian masyarakat miskin yang disebut dengan sektor informal. Yang di dalamnya terdapat petani, nelayan, penggembala, buruh, pedagang kecil, dan lain-lain. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi yang menggunakan asas kekeluargaan merupakan tumpuan atau penyangga utama perekonomian nasional. Roda perekonomian digerakkan oleh insentif ekonomi serta pertimbangan sosial dan moral juga diperhatikan. Kesetaraan sebagai perwujudan persatuan dan kedaulatan. Sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah, namun peran pemerintah bukanlah kepemilikan. Dalam sistem perekonomian Pancasila, perekonomian adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Putri, 2023).

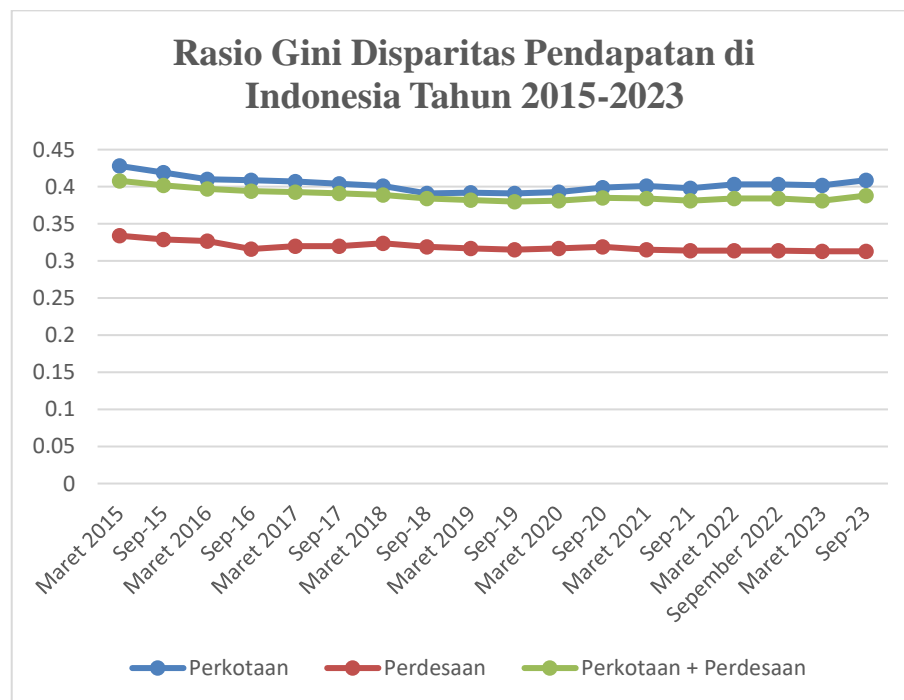
Masalah Disparitas Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Tujuan ekonomi pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini didasarkan pada lima sila Pancasila yang dituangkan dalam lima landasan ekonomi: ekonomi moralitas atau ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi nasionalisme, dan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Indikasi bahwa prinsip inti Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak diterapkan secara tepat dan akurat adalah kesenjangan ekonomi yang terus meningkat (Putri, 2023).

Disparitas pendapatan merupakan salah satu jenis ketimpangan ekonomi. Dalam menentukan disparitas pendapatan, ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah alat ukur kemiskinan relatif yang penting untuk dilihat. Dua permasalahan besar yang dihadapi banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), termasuk Indonesia adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah serta jumlah penduduk yang hidup

dalam kemiskinan. Ketimpangan yang timbul hanya dapat diminimalkan sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh struktur sosial tertentu guna menjaga perdamaian di dalamnya ketika hal tersebut berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ketimpangan masih terjadi di mana-mana, baik di negara kaya, berkembang, maupun miskin. Tingkat ketimpangan di setiap negara hanya berbeda besarnya (Putri, 2015).

Rasio Gini merupakan salah satu indikator atau ukuran kesenjangan pendapatan yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan perekonomian di Indonesia. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0 dan 1, dimana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang ideal, atau ketika setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, atau ketika satu orang atau kelompok menguasai seluruh pendapatan. Kesenjangan pendapatan antar berbagai kelas sosial tercermin dalam fenomena ekonomi yang disebut disparitas pendapatan, yang diukur dengan Rasio Gini. Ketimpangan pendapatan suatu daerah atau negara meningkat seiring dengan semakin besarnya rasio gini. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata menyebar ke seluruh golongan masyarakat yang ada. Rasio Gini menunjukkan potret nyata dari kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat selain sebagai metrik statistik. Berikut adalah data disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia sejak 2015-2023 :



Gambar 2. Grafik Rasio Gini Disparitas Pendapatan di Indonesia Tahun 2015 - 2023
(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Klasifikasi kesenjangan pendapatan di Indonesia masih berada pada kisaran sedang, yaitu pada kisaran $0,3 \leq G \leq 0,5$. Grafik di atas ini menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi tahunan yang signifikan terhadap kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Dari tahun 2015-2023, ketimpangan paling tinggi terjadi

pada tahun 2015. Pada tahun 2017–2018, wilayah perkotaan di Indonesia mengalami penurunan ketimpangan dari 0,407 menjadi 0,391. Di wilayah pedesaan, ketimpangan juga turun dari 0,320 menjadi 0,319 pada tahun 2017–2018. Sebaliknya, kesenjangan pendapatan di wilayah perkotaan meningkat dari 0,392 menjadi 0,399 pada tahun 2019–2020. Hal ini disebabkan oleh bencana yang terjadi pada tahun 2020 yaitu penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan banyak usaha yang tutup dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

Variabel makroekonomi digunakan oleh Putri et al. (2015) dalam penelitiannya untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia antara lain investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya akan terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dengan derajat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya investasi, HDI, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Widyawati & Muchlisoh, 2022).

Sjafrizal (2012) mengemukakan bahwa variasi kandungan sumber daya alam dan variabel demografi merupakan penyebab utama kesenjangan ekonomi antar wilayah. Karena wilayah dengan kandungan sumber daya alam yang tinggi dapat menghasilkan komoditas dengan biaya yang relatif rendah sehingga memacu ekspansi ekonomi yang lebih cepat, inilah mengapa variasi kandungan sumber daya alam menjadi faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Sementara itu, wilayah dengan sumber daya alam yang lebih kecil akan memproduksi barang-barang dengan biaya produksi yang lebih besar dan daya saing yang lebih buruk. Variasi yang signifikan dalam kondisi demografis dapat memperburuk kesenjangan karena demografi yang menguntungkan akan menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan prospek lapangan kerja. Sebaliknya, demografi yang buruk akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan lambatnya pertumbuhan ekonomi (Wardhana, 2021). Selain itu, menurut penelitian (Nuraini, 2023) tingkat pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Tingkat pendidikan berdampak pada produktivitas kerja, yang dapat meningkatkan output dan pendapatan daerah secara keseluruhan. Tingkat pendidikan penduduk akan berdampak positif terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi.

Disparitas pendapatan yang semakin besar membahayakan stabilitas sosial dan ekspansi ekonomi serta berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan ekstrem (Widyawati & Muchlisoh, 2022). Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang lebih inklusif dan sejalan dengan sistem perekonomian Pancasila, diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Dua fokus utama sistem ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

1. Pemerataan Pembangunan atau Infrastruktur

Untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan, saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pemerataan

pembangunan atau infrastruktur, khususnya di wilayah Timur Indonesia dan wilayah pinggiran atau terdepan Indonesia. Tujuannya agar perekonomian tumbuh pada tingkat yang tinggi dan berkeadilan dengan merangsang pergerakan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara signifikan dan untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak hanya terjadi di perkotaan saja, sehingga tertinggal di daerah lain. Di seluruh wilayah Indonesia, pemerataan pembangunan dilakukan di bidang perumahan, layanan kesehatan, ketenagalistrikan, pengelolaan limbah, telekomunikasi, transportasi, sumber air, dan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, tanpa adanya urbanisasi, semua orang dari strata sosio-ekonomi dan wilayah geografis yang berbeda dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang sama.

2. Pemerataan Tingkat Pendidikan

Anggota masyarakat dapat mempelajari standar, mensosialisasikan nilai-nilai, dan mengembangkan etos kerja melalui pendidikan, yang merupakan alat yang berharga. Menurut Todaro dan Stephen (2006), mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan telah mencapai usia kerja akan berpengaruh terhadap pendapatannya di masa depan jika memilih untuk berinvestasi pada pendidikannya. Uang yang diperoleh semakin bertambah seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Meskipun mulai bekerja penuh waktu pada usia lanjut, individu yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan penghasilan lebih besar daripada mereka yang mulai bekerja lebih awal. Kuznet dkk. (dalam Carnoy et al., 2012) menegaskan bahwa kesetaraan kekayaan akan semakin besar jika semakin banyak pendidikan masyarakat. Ketimpangan pendapatan akan berkurang akibat pemerataan pendapatan.

Permasalahan kesenjangan pendidikan terus menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Sulitnya memperoleh layanan pendidikan, khususnya di lokasi 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) menjadi salah satu tandanya. Oleh karena itu, penurunan konsentrasi masyarakat terpelajar di perkotaan, kemudahan akses terhadap sumber daya pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah 3T merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia (Rosmana, dkk., 2023). Inisiatif lainnya termasuk membangun fasilitas pendidikan di daerah tertinggal dan terpencil, menawarkan beasiswa dan bentuk dukungan lainnya kepada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah yang sulit dijangkau, dan mendorong pendidikan non-formal dan kursus kejuruan sebagai pelengkap atau alternatif pendidikan formal.

3. Pemerataan Upah Minimum

Menurut jurnal (Putra & Yasa 2020), Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pekerja. Ketentuan upah minimum akan memperburuk inefisiensi pasar tenaga kerja. Artinya, pekerja akan lebih mempunyai kekuatan karena peraturan upah

minimum, yang cenderung akan melindungi pekerja yang pernah bekerja di industri tersebut.

Namun fenomena sosial yang terjadi di Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya adalah petani yang tidak menerima UMR, sedangkan mereka yang menerima UMR merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jumlah anggota keluarga yang banyak. Artinya UMR berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 mengganti istilah Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat 1 dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota dalam suatu provinsi. Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan. Dengan demikian, kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan pekerja untuk mengeluarkan uang lebih banyak, dan pada akhirnya perekonomian masyarakat akan tumbuh, sehingga perkembangan UMR akan berdampak pada tingkat kemiskinan (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah upaya yang terstruktur dan terencana untuk mentransformasikan sebuah keadaan perekonomian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang berguna untuk mengatasi hambatan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan yang disebut juga dengan empowerment adalah suatu upaya atau kegiatan yang berguna untuk meningkatkan (daya, kekuatan, tenaga, kesanggupan, dan kekuasaan) kepada individu ataupun kelompok dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui bidang ekonomi, pendidikan, spiritual, atau sarana sosial. Oleh karena itu, esensi pemberdayaan dapat berubah tergantung pada bidang di mana pemberdayaan tersebut dilaksanakan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian maka perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Program UMKM merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha kecil yang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Produktivitas suatu UMKM akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran sehingga menurunkan disparitas pendapatan. Pemberdayaan masyarakat melalui operasional UMKM merupakan langkah strategis terutama dalam memperkuat perekonomian sebagian besar masyarakat, khususnya dengan menciptakan lapangan kerja, organisasi usaha, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sistem Ekonomi Pancasila menekankan kekeluargaan, gotong-royong, kemanusiaan, dan keadilan. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam struktur perekonomian Indonesia, salah satunya adalah disparitas pendapatan. Derajat perbedaan atau disparitas pendapatan di Indonesia digambarkan dengan Rasio Gini. Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, variasi kondisi demografi, dan pencapaian tingkat pendidikan merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap disparitas pendapatan. Selain memberikan analisis menyeluruh mengenai permasalahan ini, jurnal ini juga menyarankan solusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan guna menciptakan perekonomian yang lebih inklusif. Pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan, kesetaraan gaji minimum, pemberdayaan masyarakat, dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan solusi yang dapat membantu menurunkan disparitas pendapatan. Penerapan solusi-solusi diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mencapai tujuan keadilan sosial yang digariskan dalam ideologi Pancasila.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari bahwa, karena pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dari peneliti sendiri, ada banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, terutama dalam hal bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membuat artikel lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB, Framework of Inclusive Growth Indicators (FIGI) Database, 2014 (<https://www.adb.org>) diakses tanggal 31 Maret 2024
- Annisa Indah Mutiasari, 2020. Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.IX No.2, Agustus 2020 Hal. 32 - 41.
- Anwar, M. H., Ramadani, M. J., Utomo, G. P., Murnawi, F. F., Rozi, A. H., & Vionilla, K. (2019). Analisis Ketimpangan Perekonomian terhadap Tingkat Pendidikan di Kecamatan Prambanan. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL)*, 3(1), 26-33.
- BPS. (2018). Statistik Kriminal Tahun 2018. Jakarta.
- BPS. (2019). Statistik Kriminal Tahun 2019. Jakarta.
- BPS. (2020a). Gini Ratio Provinsi 2012-2020. Jakarta.
- BPS. (2020b). Statistik Kriminal Tahun 2020. Jakarta.

- Carnoy, M., Loyalka, P., Androuschak, G., 2012. Does Expanding Higher Education Equalize Income Distribution? The Case of the BRIC Countries. Working Papers. *Center for Education Policy Analysis: Stanford University*.
- Deliabilda, S. A., Marlisa, V., Anditya, F. S., Ariana, T., & Dasman, S. (2021). Penerapan Nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam Percepatan Ekonomi Inklusif di Era Society 5.0. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 1-20.
- Elli Ruslina, S. H. (2012). *Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat konstitusi UUD negara tahun 1945* (Vol. 1). Total Media.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.
- Haughton J. and Khandker S.R., 2009, Handbook on poverty and inequality, The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank
- Nuraini, E. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di wilayah gerbangkertosusila. *Jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 5(1), 52-67.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2023). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 405-418.
- Putra, I. P. N. M., & Yasa, I. N. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kepulauan Nusa Tenggara. *E-Jurnal EP Unud*, 9(8), 1804-1832.
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 163-172.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6).
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161-170.

- Prapti, L. (2006). *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Persada Syawie, M. (2013). Ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2).
- Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 436-445.
- Subrata, B. A. Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyu, A. M., Anugrah, P. G., Danyalin, A. M., & Noorrizki, R. D. (2021). Ketimpangan Ekonomi Berdampak pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 170-178.
- Wardhana, I. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan pendapatan dan Middle income trap. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 111-132.
- Widyawati, D., & Muchlisoh, S. Poverty Map sebagai Potret Ketimpangan Pendapatan Area Kecil di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 2.
- World Economic Forum (WEF), Global Risk 2014, Ninth Edition is published by the World Economic Forum.